

Peran Indonesia dalam Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular

Bulbul Abdurachman¹

Bagus Mi'raz Prakoso²

Abstract

South-South and Triangular Cooperation (SSTC) is not a new issue in international development cooperation. South-South Cooperation itself has a long history and has contributed to the international development half a century. Indonesia itself actively involved in SSTC since the Asian-African Conference (AAC), in 1955, this conference became the starting point of a political movement of the joint development of third world countries to carry out international cooperation. Strengthening the role of Indonesia in SSTC significantly more noticeable with the inclusion of Indonesia as a G20 member, and the change of economic status Indonesia become "Middle Income Country", the position of Indonesia today not only as a recipient country but also as a provider. This research was to find out how Indonesia's membership in G20 could effect on Indonesia's role in South-South and Triangular Cooperation (SSTC) itself. Besides this paper aims to identify obstacles and challenges in implementing SSTC in Indonesia, as well as how the prospect of Indonesia after the Single Agency established within the framework of SSTC. Hopefully, this research can be beneficial to all parties, especially for students.

Keywords:

South-South and Triangular Cooperation (SSTC); Foreign Aid; Indonesia; Single Agency.

A. Pendahuluan

Dalam upaya mendukung pembangunan nasional, Indonesia aktif melakukan kerjasama internasional, baik pada lingkup bilateral, multilateral, maupun lingkup regional. Seperti misalnya kerjasama bilateral Indonesia-Philipina di bidang perdagangan ekspor-impor, menjadi anggota G20 yang merupakan bentuk

kerjasama multilateral, serta menjadi anggota ASEAN (*Asociation of South East Asia Nation*) sebagai bentuk kerjasama regional.

G20 sendiri dibangun sebagai terobosan baru dalam kerjasama multilateralisme. Jumlah anggotanya yang 20 dipandang signifikan dan sistematis. Dengan penetapan jumlah yang terbatas, G20 meyakini kemampuan dan efektivitas

¹ Jurusan Hubungan Internasional Fisip UNPAS, untuk keperluan akademik yang bersangkutan dapat dihubungi melalui bulbul.abdurachman@unpas.ac.id.

² Jurusan Hubungan Internasional Fisip UNPAS.

untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Keduapuluh anggota secara keseluruhan menguasai 80% lebih perekonomian dunia yang ditandai dengan pertumbuhan GNP, penguasaan aliran investasi asing, pasar, perdagangan dunia dan populasi dunia. Asumsi yang diyakini adalah bahwa bila perekonomian di keduapuluh anggota ini sehat, maka akan sehat pula perekonomian seluruh dunia. Sehingga, keberhasilan forum ini akan membawa dampak positif dan sistematis yang signifikan bagi Negara-negara dan entitas ekonomi dunia yang saat tidak menjadi anggota G20. Pertumbuhan ekonomi di keduapuluh anggota ini akan membawa pertumbuhan yang stabil di Negara-negara lain (Hermawan, 2011).

Posisi G20 sebagai sebuah forum kerjasama internasional yang berlandaskan komitmen dan konsensus yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Walau tidak mengikat secara hukum, bahwa G20 secara diplomatik diakui sebagai sebuah forum yang memiliki reputasi yang tinggi.

Indonesia telah menjadi anggota G20 sejak forum *intergovernmental* ini dibentuk di tahun 1999. Bagi Indonesia klub eksklusif ini merupakan wilayah bergengsi tinggi di mana Indonesia dapat mencapai kepentingan-kepentingan nasionalnya. Namun Indonesia memahami posisi strategis dan tanggungjawab untuk mewakili Negara-negara berkembang. Pertama Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang karena pertumbuhannya ekonominya tercatat cukup penting di antara Negara-negara berkembang lainnya. Kedua, Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat setelah China, Amerika Serikat dan India. Ketiga,

Indonesia merupakan Negara demokrasi baru dengan keanggotaan Indonesia dapat memberikan insiprasi ke Negara-negara lain untuk mempromosikan demokrasi dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi tinggi. Keempat, secara geografis Indonesia memiliki posisi yang signifikan. Indonesia merupakan anggota satu-satunya ASEAN yang menjadi anggota tetap G20. Tentu saja bisa ditambahkan bahwa Indonesia adalah salah satu Negara berkembang yang di masa lampunya pernah mengalami krisis ekonomi dahsyat dan kini telah berhasil mengatasinya perlahan dengan relative baik sehingga bisa bergabung dengan anggota G20 (Kumar (n.d.)).

Degan posisi strategis Indonesia diyakini menjadi alasan kuat dipilihnya Indonesia dalam G20. Selain potensi sebagai *global buyer* yang besar di dunia karena jumlah penduduknya yang besar, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil akan berdampak signifikan ke stabilitas pertumbuhan ekonomi Negara-negara di kawasan Asia Tenggara, dan akan lebih baik lagi lanjut dalam kestabilan perekonomian Asia dan Dunia. Dengan memiliki sejumlah keunikan maupun posisi strategis, tugas Indonesia adalah memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Indonesia diharapkan dapat memadukan kepentingan Negara-negara berkembang secara umum dan kepentingan-kepentingan Negara di Asia Tenggara.

Dinamika kerjasama internasional yang selama ini dilakukan oleh hampir seluruh negara di dunia, akhirnya membentuk sebuah pola *North-South*, atau sebuah pola ketergantungan antara negara berkembang terhadap negara maju. Namun

dalam dinamikanya, pola ini menimbulkan ketimpangan antara negara maju dan berkembang, negara berkembang selalu dianggap berada pada posisi minoritas. Pola kerjasama yang ada pun terlihat samar karena terlihat hanya sebagai kegiatan pemberian bantuan (*aid*) dari negara maju ke negara berkembang. Untuk mengatasi ketidakseimbangan ini, maka dibentuklah sebuah kerangka kerjasama internasional baru, yaitu KSST (Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular), KSST merupakan sebuah unifikasi dari dua buah kerangka kerjasama internasional, yakni KSS (Kerjasama Selatan Selatan) dengan Kerjasama Triangular. KSS adalah sebuah bentuk kerjasama antar dua atau lebih negara-negara berkembang yang meliputi kerjasama dibidang pembangunan, dan pertukaran pengetahuan dan sumberdaya di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan teknis. Sedangkan Kerjasama Triangular sendiri merupakan sebuah bentuk kerjasama antara dua atau lebih negara-negara berkembang dengan pihak ketiga, yakni negara maju.

Perubahan konstelasi global yang terjadi dewasa ini menjadi pendorong bagi negara-negara berkembang untuk dapat semakin berperan dalam sektor perekonomian dan kerjasama pembangunan. Perubahan ini antara lain ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat di *new emerging countries*, seperti Cina, India, Brasil dan Indonesia dalam beberapa waktu terakhir, sedangkan pada sisi lain pertumbuhan ekonomi dinegara-negara maju sedikit terhambat. Hingga akhirnya fenomena ini mengakibatkan peningkatan saling ketergantungan antara *advanced*

economies dan emerging economies (Kemenkeu, 2011, hlm. 2).

Kondisi-kondisi yang terjadi tersebut semakin mendorong KSST agar bertransformasi dan tidak hanya berfokus pada kerjasama teknik, melainkan harus diperluas, agar dapat mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan negara berkembang yang semakin kompleks. Dalam hal ini, kerjasama ekonomi menjadi prioritas utama sebagai salah satu faktor pendorong pencapaian pembangunan. Penguatan pada sektor kerjasama teknik, politik dan sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi pun harus ditingkatkan. Seiring dengan peningkatan posisi sebagian negara-negara berkembang sebagai “*middle income countries*”, memungkinkan negara-negara berkembang untuk muncul sebagai “*new emerging donors*” pada KSST.

Salah satu tujuan dari kerangka Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular ini adalah memungkinkan negara berkembang memperoleh kerjasama berupa pertukaran pengetahuan dan sumberdaya yang benar-benar sesuai kebutuhan. Indonesia sendiri aktif terlibat dalam KSST sejak Konferensi Asia-Afrika (KAA) pertama pada tahun 1955, konferensi ini menjadi titik awal dari pergerakan politik pembangunan bersama negara dunia ketiga untuk melakukan kerjasama internasional. Penguatan peran Indonesia di KSST lebih terlihat signifikan dengan masuknya Indonesia sebagai *Middle Income Country* atau negara dengan pendapatan menengah, posisi Indonesia saat ini tidak hanya sebagai negara penerima (*recipient*) tapi juga sebagai provider. Keterlibatan aktif Indonesia di KSST merupakan peran baru Indonesia untuk

membantu pembangunan negara yang tertinggal, sekaligus sebagai sarana investasi politik dan diplomasi ekonomi dengan memanfaatkan KSST untuk menembus pasar produk barang dan jasa Indonesia di pasar global. Dengan kata lain Indonesia memiliki modal dasar untuk turut berperan aktif dalam KSST, sebagaimana landasan politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan politik bebas aktif menjadikannya modal dasar bagi Indonesia dalam melakukan hubungan kerjasama di dunia internasional dan telah terbukti memberikan peluang dalam membangun hubungan baik dengan berbagai negara.

KSST menjadi fokus dari G-20 pada Konferensi Tingkat Tinggi di Seoul pada tahun 2010 meminta untuk dibentuknya Task Team on South-South Cooperation and Triangular (TT-SSTC) (UNOSSC n.d.). G-20 bukan sekedar kelompok biasa karena keanggotaannya terbatas namun memiliki tujuan ambisius untuk memberikan dampak secara global (Hermawan, 2010, hlm. 1-2). G-20 sebagai organisasi multilateral memiliki kepentingan kolektif bersama dan salah satunya adalah terkait Overseas Development Aids (ODA). Isu mengenai ODA ini telah menjadi perhatian khusus dari anggota G-20 sejak KTT G-20 di London. Dalam KTT G20 tersebut anggota G20 berkomitmen untuk memenuhi target Millenium Development Goals (Hermawan & Kasim, 2013).

Sebagai salah satu anggota G-20 tentunya Indonesia perlu untuk mengimplementasikan kepentingan kolektif G-20 terkait isu pembangunan tersebut. Seperti yang sudah dibahas, Indonesia memang telaf aktif dalam memberikan

bantuan kepada sesama negara berkembang melalui skema KSST. Dengan aktifnya Indonesia dalam mengimplementasikan bantuan pembangunan dalam kerangka KSST, Indonesia sudah turut berperan aktif dalam mewujudkan mutual interest (kepentingan kolektif) forum G-20. Terlebih lagi Indonesia dipercaya sebagai Co-Chair dalam TT-SSTC, dan itu berarti Indonesia berada di garis terdepan dalam menangani isu KSST di G-20 (IFAD, 2014).

Bagi Indonesia, pengembangan KSST semakin penting dengan masuknya Indonesia sebagai salah satu anggota forum G20, peran Indonesia di KSST pun berubah seiring dengan peningkatan status Indonesia sebagai “*middle income country*” dan mejadikan Indonesia sebagai “*new emerging donors*” di KSST sendiri, bukan hanya sekedar menjadi penerima tetapi juga berperan ganda sebagai negara yang memberikan bantuan kepada negara penerima.

Keangotan Indonesia di G20 memungkinkan Indonesia untuk memberikan kontribusi penting dengan menyuarakan pandangan negara-negara berkembang terhadap berbagai perubahan dan perkembangan dunia yang dapat mempengaruhi stabilitas dan pembangunan di negara berkembang. Peran ini semakin penting seiring dengan perkiraan bahwa posisi Indonesia yang akan meningkat menjadi kekuatan ekonomi ke sepuluh pada 2020, dan kelima pada 2030 (Supercycle Report, 2010).

KSST menjadi wahana yang sangat strategis bagi Indonesia sebagai *new emerging donors* untuk dapat melaksanakan peran ganda, sebagai penerima dan pemberi bantuan sekaligus. Secara bertahap hal ini

akan menjadi modal bagi terbangunnya desain kerjasama pembangunan internasional yang lebih berkeadilan. Pentingnya kemitraan antara negara maju dengan aktor lain dalam pelaksanaan kerjasama pembangunan menjadi perhatian *Development Assistance Committee (DAC) – Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)*. Bagi Indonesia hal ini menjadi sebuah peluang untuk terus berperan dalam mengembangkan skema kerjasama triangular dalam kerangka pelaksanaan bertahap dari peran ganda dan realisasidari paradigma *donorship* kepada *partnership* sebagaimana semangat dari *Jakarta Commitment* (Kristiyanto, dkk., 2015, hlm. 2). Tujuan pelaksanaan KSST Indonesia adalah untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia dan mendukung pembangunan negara-negara selatan serta meningkatkan kemandirian bersama atas dasar solidaritas, kepentingan bersama dan keuntungan bersama sesama negara selatan.

Sejak tahun 2010, KSST telah menjadi bagian dari kebijakan luar negeri Indonesia di bawah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2010-2014. Hal tersebut mengamanatkan suatu kebijakan yang komperhensif dan memperkuat peran Indonesia dalam kerjasama pembangunan internasional. Pada tahun yang sama, Tim Kornas KSST atau Tim Koordinasi Nasional Indonesia untuk Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular didirikan melalui Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk mengatasi masalah struktur kelembagaan yang kompleks dari penanganan KSST di

Indonesia. Tim Kornas sendiri terdiri dari 4 Kementrian inti sebagai empat lembaga utama dalam penanganan KSST, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bersama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg) dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Sesuai dengan salah satu target dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, yaitu untuk mengkonsolidasikan KSST Indonesia melalui pembentukan kerangka hukum dan memperkuat koordinasi kelembagaan, merupakan hal yang penting untuk membentuk suatu lembaga (agensi) tunggal atau *single agency* untuk mengakomodasi segala macam kegiatan KSST Indonesia. Dalam Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2016, Presiden telah mengamanatkan bahwa tahun ini pemerintah Indonesia perlu menyusun Peraturan Presiden tentang Pembentukan Badan Pemberian Bantuan Teknik (*Single Agency for Technical Cooperation*).

B. Pembahasan

Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular (KSST) adalah salah satu aspek penting dalam mendukung dan menguatkan kerjasama pembangunan, khususnya antar sesama negara berkembang. Secara umum, KSST telah menjadi kerangka penting bagi negara berkembang dalam berbagi informasi, pengalaman dan pengetahuan dalam pembangunan. Sebagai salah satu anggota forum G-20, peran Indonesia di KSST pun berubah seiring dengan peningkatan status Indonesia sebagai “middle income country” dan menjadikan Indonesia sebagai “new emerging donors” di KSST sendiri, bukan

hanya sekedar menjadi penerima tetapi juga berperan ganda sebagai negara yang memberikan bantuan kepada negara penerima.

Dalam pelaksanaan Kebijakan Kerjasama Pembangunan, Indonesia berpatokan pada suatu kerangka kebijakan yang tersusun atas tiga pilar utama, yaitu (a) Transfer Teknologi; (b) Perluasan Investasi pada Sektor Swasta, serta (c) Kerjasama Internasional termasuk didalamnya Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular. Ketiga pilar tersebut bersifat saling menunjang satu sama lain terutama dalam konteks meningkatnya status Indonesia sebagai “*middle income country*” dan sebagai anggota forum G-20 (Kristiyanto, dkk., 2015, hlm. 2).

Sebagai salah satu anggota G-20 tentunya Indonesia perlu untuk mengimplementasikan kepentingan kolektif G-20 terkait isu pembangunan tersebut. Seperti yang sudah dibahas, Indonesia memang telaf aktif dalam memberikan bantuan kepada sesama negara berkembang melalui skema KSST. Dalam *Triangular Cooperation and Aid Effectiveness*, Fredelone menjelaskan bahwa kerjasama pembangunan internasional dewasa ini semakin meningkat seiring dengan semakin meningkatnya peran-peran negara berpenghasilan menengah bukan hanya sebagai penerima bantuan lagi tetapi juga sebagai pemberi bantuan (Fordelone, 2009, hlm. 6). Dengan aktifnya Indonesia dalam mengimplementasikan bantuan pembangunan dalam kerangka KSST, Indonesia sudah turut berperan aktif dalam mewujudkan mutual interest (kepentingan kolektif) forum G-20. Terlebih lagi Indonesia

dipercaya sebagai Co-Chair dalam TT-SSTC, dan itu berarti Indonesia berada di garis terdepan dalam menangani isu KSST di G-20 (IFAD, 2014, hlm. 4). Selain itu, Indonesia dapat menunjukkan taringnya sebagai kekuatan baru dari “*new emerging donors*”, khususnya dalam isu pembangunan dan ODA. Dengan begitu, Indonesia diharapkan dapat meningkatkan citra negara di mata internasional.

Isu ODA telah menjadi perhatian pemimpin-pemimpin G20 sejak KTT G20 di London, dimana komitmen untuk memenuhi target *Millenium Development Goals* dimasukkan dalam deklarasi pemimpin G20. Penyediaan ODA secara khusus tercatat dalam agenda G20 sejak KTT G20 di Seoul ketika pemimpin-pemimpin G20 bersepakat memasukan agenda Pembangunan dalam proses G20 melalui apa yang dikenal dengan *The Seoul Development Consensus for Shared Growth*. Konsensus Pembangunan Seoul untuk Pertumbuhan bersama menetapkan komitmen para pemimpin G20 untuk “*work in partnership with other developing countries, and LICs in particular, to help them build the capacity to achieve and maximize their growth potential, thereby contributing to global rebalancing*” (The G20 Seoul Summit Leaders Declaration, 2010).

Secara eksplisit komitmen tentang ODA tertuang dalam the Seoul Summit Document point 53: “*We reaffirm our commitment to achievement of the MDGs ... We also reaffirm our respective ODA pledges and commitments to assist the poorest countries and mobilize domestic resources made following on from the Monterrey*

Consensus and other fora” (The Seoul Summit Document n.d., hlm. 14).

Namun, Multi Year Action Plan on Development yang ditetapkan dalam KTT Seoul tidak menyebut detail tentang operasional dari kemitraan ini. Hal ini sesuai karakteristik kerja sama G20 yang tidak membatasi gerak dan inisiatif negara anggota dalam memenuhi komitmennya, termasuk terkait implementasi kesepakatan-kesepakatan. Namun demikian, setiap pelaksanaankomitmen ini akan dituangkan dalam satu *Mutual Assessment Process* (MAP) yang dapat dimonitor dan dinilai secara *peer-review* oleh seluruh negara anggota lain.

Kondisi ini kemudian bisa diinterpretasikan bahwa anggota G20 berhak untuk mengadopsi pendekatan masing-masing dalam memenuhi komitmen tersebut. Komitmen tentang ODA kembali ditegaskan dalam KTT G20 di Cannes, 2011. Dalam Deklarasi Cannes tertuang secara eksplisit pentingnya ODA bagi pencapaian MDGs dan komitmen negara maju maupun ‘*emerging economy*’:

“In order to meet the Millennium Development Goals, we stress the pivotal role of ODA. Aid Commitments made by developed countries should be met. Emerging countries will engage or continue to extent their level of support to other developing countries...” (The G20 Final Communique, 2011).

Terminologi ODA tidak muncul dalam komunike KTT G20 di Los Cabos. Namun komitmen untuk membantu negara-negara berkembang untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan khususnya MDGs ditegaskan kembali dalam komunike tersebut:

“... we reaffirm our commitment to work with developing countries, particularly low income countries, and to support them in implementing the nationally driven policies and priorities which are needed to fulfill internationally agreed development goals, particularly the Millenium Development Goals (MDGs) and beyond.”

Pada bagian ini penulis akan mendeskripsikan bagaimana Indonesia sebagai anggota G20 memenuhi komitmen partisipasi aktif dan kontribusi finansial dalam mendukung pencapaian tujuan-tujuan pembangunan global, khususnya di negara-negara berkembang lain, dan bagaimana pemenuhan komitmen Indonesia dalam aspek penyediaan ODA dan peningkatan kapasitas negara-negara berkembang.

1. Peran Aktif Indonesia Dalam Kerjasama Selatan Selatan Dan Triangular

Indonesia telah berkontribusi secara khusus dalam Kerja Sama Selatan Selatan dan Triangular (KSST) sejak tahun 1981 (DEPTAN n.d.). KSST adalah suatu model kerjasama yang dikembangkan untuk membantu negara-negara berkembang dalam mencapai target pembangunan mereka.

Untuk meningkatkan komitmennya, Indonesia telah mencantumkan KSST sebagai salah satu prioritas dalam RPJMN 2010-2014, membentuk Tim Koordinasi KSST Indonesia dan menyusun Rencana Induk dan Cetak Biru KSST. Tim Koordinasi tersebut dirasakan mendesak karena selama ini pelaksanaan KSST dilakukan oleh Kementerian atau Lembaga terpisah dan kebijakan implementasi tersebut belum terintegrasi secara memadai (Setkab n.d.).

Bulbul Abdurachman & Bagus Mi'raz Prakoso Peran Indonesia dalam Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular

Pada tahun 2012, keseriusan Indonesia untuk meningkatkan kontribusinya ditunjukkan dengan serangkaian pertemuan yang diselenggarakan oleh kementerian dan lembaga terkait serta dengan negara-negara mitra pembangunan (Setkab n.d.). Kementerian Luar Negeri sebagai *focal point* dalam koordinasi KSST mengidentifikasi prioritas negara-negara calon penerima bantuan teknik yang nantinya dapat dilakukan oleh seluruh Kementerian atau Lembaga terkait. Kementerian ini juga menyusun *standard operational procedure* (SOP) untuk mekanisme evaluasi program pengembangan kapasitas yang nantinya akan dipakai Indonesia untuk melihat efektivitas bantuan luar negerinya. Pada tanggal 16-19 Oktober 2012 tim Koordinasi KSS dan Triangular Indonesia menyelenggarakan *Training for Evaluator Phase I* di Yogyakarta. Pada tanggal 30 Nopember – 1 Desember 2012 diselenggarakan pemutakhiran daftar prioritas nasional program bantuan teknik kerjasama Selatan Selatan.

Selain persiapan internal, pemerintah juga menyelenggarakan forum internasional, *High Level Meeting (HLM)* di Bali pada tanggal 10-12 Juli 2012 dengan tema *Toward Country Led Knowledge Hubs*. Pertemuan tersebut dihadiri 200 peserta dari 40 negara dan mitra pembangunan. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia menyampaikan bidang-bidang yang akan ditekankan dalam promosi KSST, yaitu bidang pembangunan, *good governance* dan bidang ekonomi. Indonesia meyakini bahwa Indonesia memiliki kapasitas dan keunggulan komparatif di ketiga bidang tersebut. Dalam forum internasional tersebut Indonesia juga

mengumumkan pledge Indonesia untuk berkontribusi sebesar 1,5 juta USD kepada *South-South Facility* dan *World Bank Institute* (Setkab n.d.).

Penelusuran melalui internet menunjukkan tidak ada data presis tentang jumlah pendanaan yang telah dikeluarkan pemerintah Indonesia. Sesuai dengan laporan Sekretariat Kabinet Republik Indonesia dalam kurun waktu 2000-2012, Indonesia telah berkontribusi sekitar 50 juta dolar AS (Setkab n.d.). Catatan analisis dari David Hatch menyebut bahwa dalam kurun waktu 2002-2012, Indonesia telah menyediakan dana bantuan sebesar 45 juta USD untuk negara-negara berkembang lainnya (Hatch, 2012).

Tabel 1. Rekapitulasi Pendanaan Kegiatan KSS Indonesia Periode Tahun 2000-2010

No.	Instansi	Nominal	
		Dalam Rupiah	Dalam US\$*
1.	Kementerian Pertanian	124.414.429.354	12.441.442.94
2.	BKKBN	62.659.590.000	6.265.959.00
3.	Kemendiknas	60.083.000.000	6.008.300.00
4.	Kementerian Luar Negeri	24.821.006.433	2.482.100.64
5.	IPB	19.025.000.000	1.902.500.00
6.	Sekretariat Negara	16.500.000.000	1.650.000.00
7.	Pekerjaan Umum	12.750.000.000	1.275.000.00
8.	Kominfo	10.190.850.000	1.019.085.00
9.	MMTC	7.000.000.000	700.000.00
10.	POLTEK	5.400.000.000	540.000.00
11.	Kemsos	1.600.000.000	160.000.00
12.	Perindustrian	959.297.000	95.929.70
13.	Bakosurtanal	500.000.000	50.000.00
14.	Kementerian Kehutanan	150.000.000	15.000.00
15.	Kementerian Perhubungan	24.000.000	2.400.00
16.	Lembaga lain**	73.326.250.000	7.332.625.00
	TOTAL	419.403.422.787	41.940.342.28

* Perhitungan US\$ didasarkan atas asumsi USD/Rp = 10.000 dan perhitungan inflasi 10% pertahun.

** Lembaga lain meliputi: Balai Besar Inseminasi Buatan, Sabo Training Center, Yayasan Dian Desa, NAM CSSTC, National Agribusiness in Service TC on Dairy Husbandry and Post Harvest Technology, PT Perkebunan Nusantara

VIII, Pusat Penelitian Jalan dan Jembatan, Pusat Studi Ekonomi dan Sosial, Pusat Penelitian Pembangunan dan Perumahan.

Sumber: Akuntabilitas Komitmen Indonesia pada G20, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Bappenas mencatat bahwa dalam kurun waktu 2000-2010, Indonesia mengeluarkan sekitar 41,9 juta USD untuk mendanai sekitar 700 kegiatan kerjasama Selatan Selatan. Kegiatan tersebut dilakukan oleh lebih dari 15 kementerian dan lembaga.

Tabel 1 menunjukkan rekapitulasi pendanaan pelaksanaan kegiatan KSS Indonesia periode 2000-2010.

No.	Kementerian/Lemba ga	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015	
		APBN	Hibah	APBN	Hibah	APBN	Hibah
1.	Kementerian Pendidikan	34.684.441,00	-	38.252.000,00	-	43.501.800,00	-
2.	Kementerian Luar	9.069.051,00	-	18.999.842,76	138.000,00	n.a.	-
3.	Kementerian Perhubungan	4.561.270,00	-	13.270.742,76	-	14.597.817,00	-
4.	Kementerian Pekerjaan	2.434.695,00	-	n.a.	-	n.a.	-
5.	Kementerian Sekreta riat	1.930.471,00	-	2.546.141,00	-	n.a.	-
6.	Kementerian	1.020.481,00	432.450,00	n.a.	-	n.a.	-
7.	Kementerian	978.265,00	494.040,00	244.495,00	494.040,00	244.495,00	494.040,00
8.	Badan Kependudukan dan	515.074,99	349.113,00	293.044,00	276.120,00	293.045,00	276.120,00
9.	Kementerian Kelautan	500.000,00	-	n.a.	-	n.a.	-
10.	Badan Pemeriksa Keuangan	435.989,50	-	n.a.	-	n.a.	-
11.	Kementerian Dalam Negeri	300.000,00	1.000,00	n.a.	-	n.a.	-
12.	Lembaga Ilmu Pengetahuan	159.154,00	-	364.900,00	-	-	-
13.	Kementerian PPN/Bappenas	-	30.171 * US\$	n.a.	-	n.a.	-
	TOTAL	56.588.892,00	2.556.220,00	74.879.300,00	74.879,300,00	59.407,300,00	59.407,300,00

* US\$ 1 = Rp. 9.300,00.

Sumber: Akuntabilitas Komitmen Indonesia pada G20, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Tabel 2. Rekapitulasi Anggaran Kegiatan Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular Seluruh Kementerian dan Lembaga terkait 2013-2015 (dalam ribuan)

		Alokasi 2013	Alokasi 2014	Alokasi 2015	Total Alokasi 2013-2015
APBN	Rupiah	56.588.892,49	73.972.199,10	58.637.203,04	189.198.394,63
	US\$	-	-	-	-
Hiba	Rupiah	2.275.633,17	908.167,00	770.168,00	3.953.968,17
	US\$	30.171	-	-	30.171
Total	Rupiah	59.145.115,96	74.879.366,10	59.407.371,04	193.151.262,80 (Rupiah)
					30,171 (USD)

Sumber: Akuntabilitas Komitmen Indonesia pada G20, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Tabel 3. Rekapitulasi Anggaran Kegiatan Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular di Masing-masing Kementerian 2013-2015 (dalam Rupiah kecuali diindikasikan dalam US\$)

Dalam kurun 2013-2015, kontribusi Indonesia dalam skema KSST direncanakan meningkat. Seperti dapat dilihat pada Tabel 2, pada tahun 2013, pemerintah Indonesia mengalokasikan dana sebesar 59 milyar Rupiah lebih untuk mendukung kegiatan kerjasama Selatan Selatan. Limapuluh setengah milyar lebih diambil dari APBN, sementara 2,5 milyar diambil dari dana hibah. Jumlah ini direncanakan meningkat menjadi 74 milyar lebih pada tahun 2014. Jumlah ini terdiri dari 73,9 milyar dari APBN dan 908 juta dari hibah. Pada tahun 2015 direncanakan sebesar 59 milyar lebih untuk mendukung KSST ini (Bappenas, 2013), 58,6 milyar diambil dari APBN dan 770 juta diambil dari Hibah. Sehingga dalam tiga tahun mendatang direncanakan anggaran

total mencapai 193 milyar lebih untuk program KSST ini.

Seperti ditunjukkan dalam Tabel 3, Kementerian Pendidikan merupakan kementerian yang memberikan alokasi paling besar di antara 13 kementerian dan lembaga yang terlibat. Pada tahun 2013, Kementerian ini mengalokasikan sebesar 34,6 milyar lebih untuk kegiatan KSST ini. Jumlah ini direncanakan meningkat pada tahun 2014 menjadi sebesar 38,2 milyar Rupiah dan pada tahun 2015 sebesar 43,5 milyar Rupiah. Kementerian Luar Negeri menjadi kementerian kedua dengan jumlah anggaran sebesar 9 milyar Rupiah untuk tahun 2013 dan meningkat menjadi 18 milyar pada tahun 2014. Kementerian Pekerjaan Umum mengalokasikan anggaran sebesar 2,4 milyar Rupiah untuk tahun 2013 (Bappenas, 2013).

Empat kementerian mengkombinasikan dana dari APBN dan hibah yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana dan Kementerian Dalam Negeri untuk alokasi tahun 2013. Sementara untuk tahun 2014, tiga Kementerian mendapatkan juga hibah, di samping alokasi dana dari APBN. Kementerian tersebut adalah Kementerian Kesehatan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, serta Kementerian Luar Negeri.

2. Kontribusi Indonesia dalam South-South Exchange Facility Bank Dunia

Di samping bantuan teknis yang disalurkan oleh Indonesia melalui KSST, pemerintah Indonesia juga berkontribusi pada pengembangan *the South-South*

Experience Exchange Facility Bank Dunia. Fasilitas Selatan Selatan adalah suatu multi-donor trust fund yang dibentuk sejak Oktober 2008 untuk memfasilitasi sharing pengalaman di antara negara-negara klien Bank Dunia. Pertukaran pengalaman diselenggarakan atas dasar permintaan negara penerima bantuan (*recipient*) dan dirancang khusus dengan target tertentu yang hasilnya kemudian dimasukkan dalam suatu *online knowledge library*. Fasilitas Selatan Selatan ini terdiri dari partner-partner unik termasuk dari middle income countries seperti China, Denmark, Meksiko, Belanda, Spanyol, Inggris, India, Rusia dan Kolumbia. Indonesia direncanakan bergabung dalam multi-donor trust fund ini pada tahun 2013.

Dalam laporan *World Bank Institute*, Indonesia tercatat telah aktif dalam *South-South Facility Exchanges*, sejumlah lima kali sebagai provider dan dua kali sebagai *receiver*. Sebagai contoh, Indonesia tercatat aktif bersama-sama dengan Brazil dan Meksiko dalam program pengentasan kemiskinan ekstrim (*Tackling Extreme Poverty*) di Bolivia dengan total pendanaan sebesar 77.200 USD dalam kurun waktu 3 April 2009 hingga 31 Oktober 2010 (The South-South Experience Exchange Facility, 2011, hlm. 8).

Program ini telah memberikan bekal pengetahuan dan skill kepada para perencana pembangunan di Bolivia untuk merancang dan mengimplementasikan program-program sosial yang vital dan paling diperlukan masyarakat yang paling membutuhkan.

Indonesia bersama-sama dengan China terlibat dalam program *Empowering local governments and reducing regional disparity: learning from China and Indonesia*

atas permintaan India pada periode 2 Agustus 2011 hingga 30 Juni 2012 dengan hibah sebesar 18.559 USD. Indonesia juga terlibat aktif bersama-sama dengan Afrika Selatan, Rwanda dan Macedonia dalam kegiatan resolusi konflik di Nepal (*Nepal: Understanding Experiences in post Conflict State building from South Africa, Rwanda and Indonesia*) dengan hibah sebesar 116.015 USD pada periode 22 Mei 2009 hingga 31 Maret 2010 (South-South Facility Completed Grants as of December 31, 2012).

Indonesia menjadi *providing country* dalam kegiatan *Haiti Community Driven Development Housing Reconstruction Knowledge Exchange* di Haiti dengan dana hibah sebesar USD 39.691 di tahun 2011 (The South-South Experience Exchange Facility 2011 Implementation Progress Report, 2011, hlm. 7). Melalui kegiatan ini, delegasi dari Kementerian Perencanaan Haiti mengunjungi tiga propinsi di Indonesia untuk melihat sendiri proyek-proyek rekonstruksi pasca bencana. Dalam kegiatan ini delegasi mempelajari konsep gotong royong swadaya (*community self-help*) yang telah menjadi prinsip dalam pembangunan berbasis masyarakat; pentingnya kepemimpinan nasional dan lokal yang kuat untuk menyusun rencana bagi proses pembangunan kembali pasca bencana; pentingnya sense of ownership; kemampuan koordinasi dan monitoring bantuan global, pencegahan korupsi dalam proyek-proyek rekonstruksi. Delegasi juga belajar bagaimana mereka dapat meng-upgrade infrastruktur dan pelayanan masyarakat di Haiti.

Indonesia menjadi *providing country* bagi *South-South Facility Grants* untuk beberapa kegiatan yang diselenggarakan di

beberapa negara berkembang (South-South Facility Grants under Implementation as of December 31, 2012). Indonesia menyediakan hibah untuk kegiatan "*Knowledge and Experience Exchange between Indonesia and Vietnam on Output and Results based Approach for Local Government Programs*" atas permintaan Vietnam, yang disetujui pada 21 Agustus 2012 dan berakhir pada 28 Februari 2013 dengan jumlah hibah sebesar 30.000 USD.

Sebagai bukti komitmen Indonesia sebagai middle-income country, Indonesia berkomitmen untuk menjadi partner dalam *multidonor trust fund* ini. Pada tahun 2012, Indonesia menyepakati untuk memberi kontribusi sebesar 1,5 juta USD ke Bank Dunia melalui *South-South Exchange Facility* (World Bank Institute, 2012, hlm. 8). Janji ini telah disampaikan dalam High Level Meeting di Bali pada bulan Juli 2012 dan telah tercatat dalam laporan tahunan Bank Dunia: "*Indonesia has also expressed interest in becoming a Partner in 2013 with a contribution of \$1.5 million in 2014*".

3. Penyelenggaraan *Capacity Building Program* oleh Indonesia

Kementerian Luar Negeri mencatat bahwa sejak tahun 2006 hingga Oktober 2011, Kementerian ini telah bekerjasama dengan kementerian lembaga teknis terkait dalam menyelenggarakan 42 program pelatihan yang dihadiri 542 orang dari berbagai negara di Asia, Pasifik, Timur tengah, Afrika dan Amerika Latin. Pelatihan tersebut di antaranya adalah (1) Pengembangan Inkubator bisnis untuk

pemberdayaan UKM; (2) pengembangan teknologi mikro hidro; pendirian dana pengelolaan institusi microfinance; (4) pengembangan ecotourism, (5) budidaya udang dan kerapu; (6) pengembangan teknologi pasca panen; (7) mekanisasi dan pengelolaan air untuk pertanian lahan kering. Pada periode 2007 dan 2011, Kementerian Luar Negeri menyelenggarakan program pemagangan petani asing di Indonesia. Program ini diikuti para petani dari Fiji, Gambia, Senegal, Madagaskar, Kamboja, Myanmar, Mozambik dan Komoros (Diplomasi, 2011, hlm. 252-253). Sepanjang tahun 2011, Kementerian Luar Negeri telah mengadakan 12 kegiatan pelatihan dan pemagangan di mana 108 peserta dari Asia, Afrika, Timur Tengah dan Pasifik berpartisipasi; di antaranya adalah *International Training Program on Post Harvest Technology on Fruit and Vegetables* tanggal 7-21 April 2011 dengan peserta dari Bangladesh, Fiji, Laos, Sri Lanka dan Timor Leste dan *Indonesia Apprenticeship Program for Comorian Farmers* di Indonesia 3 April 27 Mei 2011.

Pada tahun 2012 Direktorat KSST telah mengembangkan kerjasama teknik melalui 56 program di 49 negara. Sebanyak 1.014 peserta terlibat dalam program yang mencakup berbagai bidang seperti pertanian, kehutanan, perikanan, microfinance, UKM, energi terbarukan dan *good governance* (DEPTAN, 2012).

Indonesia juga telah menyelenggarakan serangkaian training dalam bidang manajemen makroekonomi dan pembangunan di *African Institute for Capacity Development (AICAD)* di Kenya (tahun 2005 dan 2007). Indonesia telah

menyelenggarakan training dalam bidang ekspor di Vietnam (2010) dan Laos (2011). Indonesia juga telah mengadakan *Trade Training Workshop on Starting Export Business* di Laos (2010) dan tentang *Planning and Executing Export Business* di Timor Leste (2011). Dalam sektor industrial, Indonesia berbagi pengalaman kepada masyarakat Mozambique tentang management produk agrokultural dan tekstil dengan mengirim pakar-pakar Indonesia ke negara Afrika tersebut di tahun 2011. Program ini terdiri dari pemrosesan dan pengolahan ketela pohon.

Dalam sektor agrikultur, Indonesia telah mengirimkan pakar untuk membantu revitalisasi *the Farmers Agricultural Rural Training Center (FARTC)* di Tanzania dan *Agricultural Rural Farmers Training Center (ARFTC)* di Gambia di tahun 2011. Ekspert Indonesia berupaya untuk meningkatkan kapasitas petani lokal dalam mengadopsi beragam metode agrikultur dan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan produksi pertanian di kawasan tersebut. Indonesia juga telah menyelenggarakan serangkaian kursus pelatihan dalam inseminasi artifisial: *The Training Course of Artificial Insemination on Dairy Cattle for Developing Countries* sejak tahun 1986. Sekitar 5.602 peserta telah mengikuti pelatihan dari lokal maupun internasional. Di antara peserta internasional berasal dari Kamboja, Laos, Vietnam, Thailand, Malaysia, Philippina, Timor Leste, Papua Nugini, Fiji, Bangladesh, India, Srilanka, Mongolia, Sudan dan Zimbabwe.

Pada tahun 2012, Badan Kebijakan Fiskal menyelenggarakan program pelatihan untuk pengembangan dan pendalaman pasar kapital di negara-negara anggota ASEAN,

khususnya CLMV dan Brunei. Pelatihan ini juga bertujuan untuk memperkuat dan memajukan kontribusi Indonesia dalam pengembangan pasar kapital di kawasan Asia Tenggara, dan untuk mendukung negara-negara partner untuk mengatasi krisis ekonomi dengan menyusun strategi dan lembaga-lembaga baru.

Dengan melalui penelusuran beragam situs, telah ditemukan beragam program dan aktivitas yang telah dilakukan Indonesia untuk mendukung pembangunan di negara-negara berkembang lainnya. Indonesia telah memberikan bantuan teknis terkait dengan *capacity building* di lebih dari empat puluh negara berkembang lain. Sumber-sumber yang tersedia di beberapa kementerian terkait yang selama ini aktif dalam KSST. Ini menggambarkan bahwa pelaksanaan KSST memang belum terkoordinasi dan terintegrasi secara baik seperti diakui oleh pejabat-pejabat terkait di lingkungan kementerian yang menjalankan program tersebut.

Indonesia juga telah menyampaikan komitmennya menjadi partner dalam program exchange facility Bank Dunia. Aktivitas Indonesia tercatat cukup baik dalam situs World Bank Institute dan Annual Report yang dibuat tahun 2011 dan tahun 2012. Dengan demikian hal tersebut membuktikan bagaimana Indonesia sebagai *middle income country* baru dalam mengemban tanggung jawabnya sebagai *new emerging donor*.

C. Kesimpulan

Penelitian ini telah mengkaji bagaimana pengaruh keanggotaan Indonesia di G20 terhadap peran Indonesia dalam Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular

(KSST). Sebagai anggota G20, Indonesia telah mengambil bagian dalam menginisiasi masuknya agenda pembangunan dalam proses G20. Indonesia telah berkontribusi secara aktif dalam mempromosikan bantuan pembangunan internasional salah satunya melalui skema Kerja Sama Selatan Selatan dan Triangular (KSST) sejak tahun 1981. KSST adalah suatu model kerjasama yang dikembangkan untuk membantu negara-negara berkembang dalam mencapai target pembangunan mereka. Keterlibatan Indonesia dalam pemberian bantuan bagi negara lain merupakan hasil dari sebuah proses yang sangat panjang. Dimulai sebagai penerima bantuan dari negara-negara seperti Jepang dan Amerika Serikat pada tahun 1960-an, Indonesia kemudian mampu mengembangkan diri melalui proyek-proyek bantuan yang dianggap sukses diimplementasikan di Indonesia. Kesuksesan dapat dilihat dari perkembangan Indonesia dalam beberapa sektor. Selain itu, kapasitas Indonesia juga mengalami perubahan dari tahun ke tahun, dimana hal tersebut ditujukan untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan Indonesia.

Sebagai salah satu anggota forum G-20, peran Indonesia di KSST pun berubah seiring dengan peningkatan status Indonesia sebagai "*middle income country*" dan menjadikan Indonesia sebagai "*new emerging donors*" di KSST sendiri, bukan hanya sekedar menjadi penerima tetapi juga berperan ganda sebagai negara yang memberikan bantuan kepada negara penerima. Sebagai penerima bantuan Indonesia telah di apresiasi karena keberhasilannya dalam memanfaatkan bantuan luar negeri tersebut. Penelitian ini

telah mempelajari bagaimana negara-negara mitra pembangunan (donor) telah secara efektif menyalurkan bantuan luar negerinya ke Indonesia melalui lembaga-lembaga pembangunan mereka seperti, USAID, JICA, dan AUSAID.

Sedangkan sebagai “*New Emerging Donor*” atau negara pemberi bantuan, Indonesia telah sukses melakukan beberapa program dalam memberikan bantuan luar negerinya ke negara-negara berkembang lainnya seperti di kawasan Afrika dan Asia Pasifik. Dengan aktifnya Indonesia dalam mengimplementasikan bantuan pembangunan dalam kerangka KSST, Indonesia sudah turut berperan aktif dalam mewujudkan mutual interest (kepentingan kolektif) forum G-20. Terlebih lagi Indonesia dipercaya sebagai Co-Chair dalam TT-SSTC, dan itu berarti Indonesia berada di garis terdepan dalam menangani isu KSST di G-20. Selain itu, Indonesia dapat menunjukkan taringnya sebagai kekuatan baru dari “new emerging donors” khususnya dalam isu pembangunan dan ODA, dengan begitu Indonesia diharapkan dapat meningkatkan citra negara di mata internasional.

Daftar Pustaka

- Bappenas. (2012). *Pengembangan Kerangka Dialog Kerjasama Bilateral dalam Rangka Optimalisasi Sumber Pendanaan Luar Negeri Bilateral*. Jakarta: Bappenas.
- Bappenas. (2014). *Kajian Bidang Kerjasama Pembangunan Internasional Dalam Rangka Penyusunan Draft RPJMN Tahun 2015-2019*. Jakarta: Bappenas.
- Deptan.(n.d.). Menyongsong dominasi positif Indonesia di Selatan dalam bidang pertanian. (Online). (<http://www.deptan.go.id/news/detail.php?id=1065>, diakses 21 April 2011).
- Diplomasi. (2011). (Online). (http://www.embassyofindonesia.org/features/pdf/Diplomasi_2011.pdf, diakses 21 April 2017).
- Fordelone, T. Y. (2009). *Triangular Co-operation and Aid Effectiveness*. OECD.
- Hatch, David. (2012). Indonesia, emerging aid donor. (<http://www.lowyinterpreter.org/post/2012/07/25/Indonesia-emerging-aid-donor.aspx>, diakses 2 Maret 2017).
- Hermawan, Y. P. (2014). *Analisis pengembangan model south-south and triangular cooperation dalam penyediaan bantuan pembangunan luar negeri (official development assistance/ODA) oleh Indonesia sebagai emerging economy dalam forum G-20*. Bandung: Universitas Katholik Parahyangan.
- Hermawan, Y. P., Sriyuliani, W., Hardjowijono, G. H. & Tanaga, S.(n.d.). *The Role of Indonesia in the G-20: Background, Role, and Objectives of Indonesia's Membership* Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung.
- Kartasasmita, K. (1983). *Organisasi Internasional*. Jakarta: Rosdakarya.
- Kemenkeu. (2011). *Kajian Membangun Kerjasama Selatan Selatan Indonesia Secara Berkelanjutan*. Jakarta: Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral Bidang Interregional Badan Kebijakan Fiskal.

- Kokange, J. O. (2014). *The Evolution of South-South Cooperation: A Personal Reflection*. Global Policy Essay.
- Kristiyanto, dkk. (2011). *Peran Kementrian Keuangan dalam Pengembangan KSST Indonesia 2015*. Kemenkeu: Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral Badan Kebijakan Fiskal.
- Kumar, Zendra.(n.d.). Masih Relevankah G-20 untuk Indonesia. (Online). (https://www.academia.edu/9628653/Masih_Relevankah_G20_untuk_Indonesia., diakses 13 April 2017).
- Media Indonesia. (2016). G20 Harus Utamakan Pertumbuhan Ekonomi. (Online). (<http://www.mediaindonesia.com/news/read/64938/G20-harus-utamakan-pertumbuhan-ekonomi/>, diakses 13 April 2017).
- Rix, A. (1993). *Japan's Foreign Aid Policy Reform and Aid Leadership*. London and New York: Routledge.
- Snyder, C. A. (2008). *Contemporary Security and Strategy*. Palgrave: Macmillan.
- Standard Chartered. (2010). Supercycle Report.
- The G20 Seoul Summit Leaders Declaration. (2010).
- Tim Koordinasi Nasional KSST. (2015). *Laporan Tahunan Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular Indonesia 2015*. Jakarta
- UNOSSC.(n.d.). *Paragraphs in the 2010 Seoul G20 Summit Document relevant to South-South cooperation (paragraph 51 (i) decision)*. (Online). (<http://ssc.undp.org/content/dam/ssc/documents/HLC>, diakses 5 Desember 2016).
- World Bank Institute. (2012). *The South-South Experience Exchange Facility. Implementation Progress Report*. Systematic Global Knowledge Exchange for Result.